

JURNAL

ISSN 1410 - 3346

IPTEK-KOM

JURNAL PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

Volume 11, No. 1, Juni 2009

OBYEKTIVITAS PEMBERITAAN

PERISTIWA GEMPA YOGYA-JATENG 27 MEI 2006

(Analisis Isi pada SKH Kompas dan SKH Kedaulatan Rakyat)

Bonaventura Satya Bharata

**POLA PENULISAN HEADLINE KORAN KUNING: ANALISIS ISI
PENGUNAAN BAHASA SENSASIONAL DALAM SURATKABAR LAMPU
MERAH, POS KOTA, METEOR, DAN MERAPI**

Iwan Awaluddin Yusuf

METAMORFOSIS KONTROL PEMERINTAH TERHADAP MEDIA MASSA

I Gusti Ngurah Putra

PEMANFAATAN INTERNET PADA PENYANDANG CACAT DI SOLO

Atjih Ratnawati

**KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN JASA AKSES INTERNET
DI KOTA YOGYAKARTA**

Sri Wahyuningsih

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PEMBUATAN DAFTAR
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) BERBASIS ANALITYCAL
HIERACHY PROCESS (AHP) PADA BPPKI YOGYAKARTA**

Agus Prabowo dan Retantyo Wardoyo

**BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA**

Jurnal Penelitian IPTEK-KOM

Susunan Redaksi

Pimpinan Umum/Penangguag Jawab

Drs. Sudji Siswanto

Pimpinan Redaksi/Ketua Pelaksana

Darmanto

Dewan Redaksi/Penyunting Ahli

Prof. Dr. J. Nasikun, Prof. Dr. Iwan Abdullah
Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, I Gusti Ngurah Putra, MA
Hermin Indah Wahyuni, Ph.D

Penyunting Tamu

Dr. Udi Rusadi
Drs. H. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc, Ph.D
Drs. Sudarsana, PGD PD

Penyunting

R.M. Agung Harimurti
Topohudoyo, Budiyo

Sekretaris

Avianto Priyo Utomo

Staf Administrasi

Dumbadi, Pandri Pratiwi

Diterbitkan oleh:

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI)
Yogyakarta
Departemen Komunikasi dan Informatika RI

Alamat Redaksi

Jl. Imogiri Barat Km. 5 Telp./Fax. 0274- 375253 Yogyakarta 55187
Email: bppi_yogyakarta@yahoo.co.id
<http://bppkiyogya.wordpress.com>

ISSN 1410-3346

Terakreditasi B, No. 133/Akred/LIPI/P2MBI

STT No. 2552/SK/DITJEN PPG/STT/1999

Tanggal, 17 Februari 1999

Jurnal IPTEK-KOM, diterbitkan sejak 1998 sebagai upaya pemasyarakatan hasil penelitian, pengkajian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan perekayasaan dalam bidang komunikasi, dan informatika. Penerbit menerima sumbagan tulisan yang belum pernah diterbitkan media lain. Ketentuan penulisan dapat dilihat pada halaman sampul belakang.

IPTEK-KOM

Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi

Volume 11 Nomor 1, Juni 2009

ISSN 1410-3346

Terakreditasi B, No. 133/Akred/LIPI/P2MBI

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Dari Redaksi	ii
OBYEKTIVITAS PEMBERITAAN	
PERISTIWA GEMPA YOGYA-JATENG 27 MEI 2006	
<i>Bonaventura Satya Bharata</i>	1
POLA PENULISAN HEADLINE KRANG KUNIG: ANALISIS ISI	
PENGUNAAN BAHASA SENSASIONAL DALAM SURATKABAR LAMPU	
MERAH, POS KOTA, METEOR, DAN MERAPI	
PROGRAM TELEVISI BERKUALITAS RENDAH	
<i>Iwan Awaluddin Yusuf</i>	25
METAMORFOSIS KONTROL PEMERINTAH TERHADAP MEDIA MASSA	
<i>I Gusti Ngurah Putra</i>	47
PEMANFAATAN INTERNET PADA PENYANDANG CACAT DI SOLO	
<i>Atjih Ratnawati</i>	63
KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN JASA AKSES INTERNET	
DI KOTA YOGYAKARTA	
<i>Sri Wahyuningsih</i>	81
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PEMBUATAN DAFTAR	
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) BERBASIS ANALITYCAL	
HIERACHY PROCESS (AHP) PADA BPPKI YOGYAKARTA	
<i>Agus Prabowo dan Retantyo Wardoyo</i>	101

Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Informatika (BPPI), Depkominfo RI

Jl. Imogiri Barat Km. 5 Yogyakarta 55187

Telp./fax.: 0274-375253 - Email: bppi_yogyakarta@yahoo.co.id

<http://bppkiyogya.wordpress.com>

OBYEKTIVITAS PEMBERITAAN

PERISTIWA GEMPA YOGYA-JATENG 27 MEI 2006

(Analisis Isi pada SKH Kompas dan SKH Kedaulatan Rakyat)

Bonaventura Satya Bharata

This article represent the summary of news research of earthquake's news in the Yogyakarta and Central Java at May 27th 2006 on daily newspaper of Kompas and Kedaulatan Rakyat. Research focus at news obyektivitas. Result of research indicate that between Kompas and Kedaulatan Rakyat have the high same degree of obyektivitas in the case of sentence type used in writing news, coalescence of time of news pervasion, factuality, and used attribute. Kompas have the higher degree obyektivitas in the case of according to title with the content of news and supporter data compared to by Kedaulatan Rakyat.

Kata-kata kunci:

Obyektivitas, Hayakawa-Lowry, Westerstahl

Latar Belakang

Peristiwa Gempa bumi yang melanda Yogyakarta –Jawa Tengah (Yogya-Jateng) pada tanggal 27 Mei 2006 mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Lebih dari 5.000 jiwa meninggal dunia, ribuan rumah dan bangunan fasilitas umum rusak berat. Sejumlah infrastruktur, seperti jaringan telekomunikasi, sempat mengalami kelumpuhan dalam beberapa hari setelah gempa. Bencana alam yang terjadi menjelang pukul 06.00 WIB itu menimbulkan dampak yang luar biasa besar bagi kehidupan masyarakat Yogya-Jateng, terutama mereka yang berada di jalur utama gempa.

Peristiwa tersebut tentu tidak lepas dari liputan media. Hanya beberapa jam setelah kejadian, stasiun radio dan televisi melakukan siaran langsung terhadap peristiwa tersebut. Media cetak tidak kalah gesit memberitakan peristiwa gempa ini. Seminggu penuh pasca gempa, berita bencana tampak mendominasi pemberitaan media cetak, baik nasional maupun lokal. Surat Kabar Harian (SKH)

Kompas bahkan menurunkan berita bencana gempa ini sebagai edisi nasional dan lokal, sedangkan *Kedaulatan Rakyat* sebagai surat kabar tertua di wilayah Yogyakarta, tidak ketinggalan. *Kedaulatan Rakyat* memberikan rubrik khusus tentang bencana gempa ini.

Kemasan berita yang terserak di surat kabar pada saat liputan gempa Jogja-Jateng menarik untuk dicermati. Dari sisi tematis, ada yang menekankan pada korban baik manusia maupun prasarana fisik, ada pula tentang bantuan yang datang dari berbagai penjuru daerah dan dunia. Sisi lain menyorot tentang aktivitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tinggal di Yogyakarta hampir seminggu penuh untuk memantau perkembangan penanganan bencana gempa pada masa tanggap darurat. Tidak jarang pula surat kabar memberitakan tentang perkembangan gempa itu sendiri, yang ternyata menimbulkan sesar atau patahan yang memanjang dari pantai selatan Yogyakarta hingga Klaten. Kalaupun membahas tematis yang sama, kemasan dari masing-masing surat kabar terasa berbeda.

Peliputan berita yang demikian intens atas peristiwa gempa yang melanda Jogja-Jateng, tentu karena peristiwa tersebut memiliki nilai berita yang tinggi. Dari segi jumlah korban manusia mencapai 5000 orang merupakan nilai berita *magnitude* yang menjadi pertimbangan utama bagi proses produksi berita baik bagi *Kompas* maupun *Kedaulatan Rakyat*. Belum lagi sisi human interest atau sisi manusiawi dari peristiwa tersebut merupakan nilai berita yang menonjol. Khusus bagi *Kedaulatan Rakyat*, peristiwa ini tentu memiliki kedekatan geografis dan emosional dengan institusinya. Tidaklah mengherankan apabila *Kedaulatan Rakyat* memberikan perhatian besar terhadap bencana ini.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, bagaimana *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* memberitakan peristiwa gempa Yogya-Jateng yang memiliki nilai dramatis, apakah mampu memertahankan obyektivitas, dalam arti mampu memisahkan fakta dengan opini (baca : emosi) ketika melakukan peliputan dan penulisan berita?

Kerangka Teori

Berbicara tentang proses peliputan dan penulisan berita, obyektivitas merupakan sebuah konsep yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam praktik jurnalistik, setiap jurnalis diharapkan mampu melakukan metode obyektivitas dalam pelaporan peristiwa (peliputan dan penulisan) menjadi berita. Seperti dikatakan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2003: 88) pada awalnya konsep obyektivitas tidak

dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa jurnalis bebas dari bias, bahkan malah sebaliknya. Konsep ini tumbuh ketika jurnalis berada dalam suatu suasana di masa lalu (1920-an) yang memungkinkan terjadinya bias walau seringkali dilakukan secara tidak sadar. Konsep ini akhirnya menuntut jurnalis untuk mengembangkan metode peliputan dan penulisan berita secara konsisten menguji informasi hingga bias personal mampu dihindari. Secara sederhana obyektivitas dapat dipahami sebagai pemisahan fakta dengan opini dan ketidakberpihakan.

Pemisahan fakta dari opini berarti bahwa dalam setiap peliputan dan penulisan berita, jurnalis tidak diperkenankan mencampurkannya dengan pendapat pribadi. Misalnya dalam melukiskan sebuah peristiwa kecelakaan transportasi. Bila yang terjadi adalah kecelakaan yang menelan banyak korban, dengan ditandai kondisi korban yang terluka dan alat transportasi yang rusak, jurnalis tidak diperkenankan menuliskan peristiwa tersebut sebagai "*kecelakaan yang maha dahsyat*". Yang bisa dilakukan jurnalis hanyalah mendeskripsikan bagaimana kondisi korban dan kondisi alat transportasi pada kecelakaan tersebut. Kesimpulan akhir diberikan kepada khalayak. Sedangkan ketidakberpihakan, biasanya terjadi pada saat peliputan berita dengan nilai berita konflik. Jurnalis tidak diperkenankan untuk memberikan kesempatan yang berbeda dari pihak-pihak yang berkonflik untuk muncul dengan frekuensi dan intensitas atau proporsional yang berbeda. Jurnalis diharapkan bersikap akomodatif pada semua pihak yang berkonflik. (Westerstahl dalam Mc Quail, 1992; 183-195).

Selain versi Westerstahl, ada beberapa konsep obyektivitas yang diperkenalkan oleh penulis lain. Menurut Hayakawa-Lowry obyektivitas dapat dilihat melalui penggunaan jenis kalimat oleh jurnalis. Ada tiga jenis kalimat yang digunakan, yakni kalimat laporan, kalimat inferensi, dan kalimat keputusan. Kalimat laporan merupakan kalimat yang berisi informasi faktual dan dapat diverifikasi. Sedangkan kalimat inferensi merupakan kalimat prediksi, interpretasi, atau pernyataan yang tidak jelas dasarnya. Kalimat keputusan adalah kalimat yang merupakan ekspresi penulis atau kutipan dari narasumber yang menunjukkan setuju atau tidak setuju terhadap sebuah peristiwa atau orang (Noviriyanti, 2006; 66).

Dengan demikian mengacu pada pemahaman ini, obyektif tidaknya sebuah berita akan dilihat dari penggunaan jenis kalimat oleh jurnalis ketika mendeskripsikan sebuah realitas menjadi berita. Semakin banyak penggunaan kalimat laporan semakin baik. Sebaliknya semakin sedikit penggunaan kalimat laporan dan lebih sering menggunakan kalimat inferensi, tingkat obyektivitas pun semakin rendah. Konsep kalimat laporan dan kalimat inferensi ini setara dengan

konsep obyektivitas Westerstahl tentang faktualitas, yang menuntut pemisahan fakta dari opini jurnalis dalam menulis berita. Sedangkan kalimat keputusan, mengacu pada konsep imparsialitas Westerstahl, yang berarti sejauhmana jurnalis mampu secara akomodatif menampilkan secara seimbang pihak-pihak yang bertikai dalam sebuah peristiwa. Semakin berimbang baik dari sisi frekuensi dan intensitas berarti obyektivitas sebuah berita juga semakin tinggi.

Terkait dengan pemberitaan gempa Jogja-Jateng 27 Mei 2006, haruslah diakui bahwa nilai berita dramatis atau berbasis ketegangan merupakan nilai berita yang diyakini mampu mengundang perhatian pembaca. Sebenarnya tidak hanya dalam berita, tetapi juga sebagai sebuah nilai yang dipandang laku jual di industri media. Tengok saja beberapa acara televisi swasta yang menggunakan adegan dramatis sebagai bagian dari isi program, misalnya Indonesian Idol di RCTI atau AFI yang pernah populer di Indosiar. Pada saat eliminasi peserta yang diwarnai isak tangis dan perasaan haru, selalu memiliki porsi waktu penayangan yang cukup lama. Demikian pula pada produksi sinetron ataupun film, bumbu adegan dramatis selalu menyertai penyajian.

Apa kaitan antara nilai berita dramatis dengan proses produksi berita gempa? Satu, dari sisi konteks kehidupan media, harus diakui bahwa media kita tumbuh dan besar pada seting industri. Kompas dan Kedaulatan Rakyat, bukanlah institusi komunikasi semata yang bekerja mengolah realitas menjadi produk informasi, tetapi juga merupakan institusi ekonomi (industri) yang juga memerhitungkan keuntungan atau profit dalam setiap prosesnya. Dalam perspektif kritis muncul keyakinan bahwa proses pemberitaan yang berlangsung di media memiliki implikasi untuk mendapatkan keuntungan.

Artikel penelitian ini akan melihat sisi obyektivitas pemberitaan media mengenai peristiwa yang bernuansa dramatis berupa gempa bumi yang melanda Jogja - Jateng pada Sabtu, 27 Mei 2006. Melalui pemaparan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah deskripsi isi berita gempa Jogja - Jateng di Kedaulatan Rakyat dan Kompas ditinjau dari sisi obyektivitas ?

Untuk mempermudah pembacaan tulisan ini, maka konsep-konsep yang digunakan sebagai unit analisis dan kategorisasi untuk melihat obyektivitas pemberitaan gempa Jogja-Jateng 27 Mei 2006 di *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* adalah sebagai berikut.

UNIT ANALISIS	KATEGORISASI	SUB KATEGORISASI
Jenis Kalimat	• Kalimat Laporan (Beratribut dan Tidak Beratribut) • Kalimat Inferensi • Kalimat Lainnya	
Akurasi	Kesesuaian Judul – Isi Berita	Sesuai Tidak Sesuai
	Pencantuman Waktu	Dicantumkan Tidak Dicantumkan
	Data Pendukung	Ada Tidak Ada
	Faktualitas Berita	Tidak Campur Fakta-Opini Campur Fakta-Opini
Validitas	Atribut Sumber Berita	Jelas Tidak Jelas
	Kompetensi	Jurnalis Pelaku Langsung Pelaku Tidak Langsung

Penulis sengaja memilih Kompas dan *Kedaulatan Rakyat* dengan pertimbangan lebih pada masalah kemudahan akses untuk kedua surat kabar tersebut. Namun di sisi lain, argumentasi yang dapat diberikan adalah bahwa *Kompas* mewakili surat kabar besar untuk skala nasional, sedangkan *Kedaulatan Rakyat* mewakili surat kabar lokal besar untuk wilayah Yogyakarta. Hasil penelitian ini paling tidak mampu mencerminkan bagaimana dinamika surat kabar besar nasional dan lokal memberitakan peristiwa bencana seperti gempa Jogja-Jateng pada 27 Mei 2006.

2. Pemberitaan di SKH Kompas

a. Berdasarkan Jenis Kalimat

Analisis isi obyektivitas yang didasarkan pada jenis kalimat, seperti yang ditawarkan oleh Hayakawa-Lowry pada pemberitaan Gempa Yogya-Jateng di *Kompas*, dari 188 kalimat yang diteliti, menghasilkan data: (1) Kalimat Laporan Beratribut sebanyak 40,95%; (2) Kalimat Laporan Tidak Beratribut 57,44%; (3) Kalimat Inferensi 0%, dan; (4) Kalimat Lainnya 1,59%.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa *Kompas* tidak menggunakan satupun kalimat inferensi. Artinya tidak ditemukan satupun kalimat yang

menggunakan subyektivitas jurnalis dalam peliputan dan penulisan berita gempa Yogya-Jateng. Jurnalis *Kompas* terlatih baik dalam menuliskan peristiwa menjadi berita sehingga mampu menghindarkan subyektivitas dalam merekonstruksi peristiwa. Dalam pemberitaan gempa Yogya-Jateng *Kompas* lebih mendeskripsikan peristiwa tersebut dalam bentuk kalimat laporan. Unikanya, kalimat laporan beratribut cukup mendominasi (40,59%). Artinya selain melaksanakan teknik pengumpulan fakta berupa observasi, *Kompas* banyak melakukan verifikasi temuan fakta berita dengan pihak-pihak berkait untuk membuktikan benar-tidaknya fakta di lapangan.

Adapun contoh beberapa kalimat laporan beratribut adalah sebagai berikut.

Direktur Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Budaya dan Pariwisata Suroso yang ditemui di Kompleks Candi Prambanan mengaku prihatin dengan kerusakan di Candi Brahma itu. "Anda melihat sendiri kondisinya, Candi Brahma rusak berat. Butuh waktu lama untuk menata dan memperbaiki kembali candi itu," jelasnya. (dalam *Candi Brahma Prambanan Rusak Berat, Kompas* / 28 Mei 2006)

Di Yogyakarta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY Sugito MSi mengimbau sekolah yang bangunannya rusak agar menitipkan kegiatan belajar mengajarnya di sekolah terdekat dulu. Namun, jika memang tidak ada sekolah terdekat yang juga layak untuk digunakan, semua bangunan yang dinilai masih layak bisa digunakan. (dalam *68 Sekolah Di Gunung Kidul Rusak, Siswa Trauma, Kompas* / 30 Mei 2006)

b. Berdasarkan Kesesuaian Judul dengan Isi Berita

Adapun data obyektivitas berdasarkan atas kesesuaian judul dengan isi berita yang merupakan salah satu unsur akurasi, dari 190 kalimat yang diteliti, menghasilkan data yang sesuai sebesar 56,84% dan yang tidak sesuai 43,15%. Yang dimaksud dengan berkesesuaian antara judul dengan isi berita di sini adalah antara judul utama dengan berita. Maka yang diuji adalah apakah tulisan yang dihasilkan oleh jurnalis dalam mendeskripsikan peristiwa gempa sudah sesuai antara judul utama dengan isinya. Jadi bukan antara judul berita sekundernya. Berbeda dengan pengujian obyektivitas sebelumnya, yang menggunakan unit analisis jenis kalimat, yang menghasilkan obyektivitas yang sempurna, maka untuk data yang menguji kesesuaian antara judul utama dengan isi berita, menunjukkan bahwa *Kompas* ternyata cukup banyak mendeskripsikan berita yang tidak berkesesuaian antara judul utama dengan isi berita. Angkanya bahkan hampir menyentuh 50%. Judul utama berita yang diturunkan *Kompas* terlalu sempit untuk

menampung peristiwa yang diceritakan di tubuh berita (*body*). Berikut contoh berita yang menunjukkan ketidaksesuaian antara judul dengan isi berita

Berhentinya produksi selama beberapa hari ini, menurut Agus Yulianto dari Badan Pengawas Koperasi Batur Jaya, tidak berdampak signifikan terhadap kondisi industri pengecoran logam.

Tarif listrik yang mahal bagi industri dan langkanya bahan baku justru menjadi “gempa” sesungguhnya yang lebih dahsyat bagi perajin logam di Ceper. “Bayangkan saja seperti saya, kena tarif listrik multiguna, kenaikannya bisa 100 persen. Saya sampai frustrasi,” kata Agus. (dalam *Sentra Gerabah Lumpuh-Laboratorium Bantuan Jepang Rusak, Kompas* / 01 Juni 2006)

Penceritaan yang mengemukakan tentang berhentinya produksi pengecoran logam di daerah Ceper, Klaten menjadi tidak relevan dengan judul utama berita yang bercerita tentang lumpuhnya produksi gerabah di daerah Wedi-Klaten. Bahkan alasan yang dimunculkan berkenaan dengan terhambatnya perkembangan produksi pengecoran logam, justru tidak disebabkan oleh gempa Yogya-Jateng, tetapi oleh tingginya tarif listrik dan mahalanya bahan baku industri. Jadi, ini justru semakin menjauhkan esensi penceritaan tentang lumpuhnya sentra gerabah yang terjadi di Wedi-Klaten.

Ada contoh unik dari penyimpangan yang terjadi antara judul berita dengan isinya yang ditampilkan oleh Kompas:

Gunung Kidul, Kompas - Minimal 68 sekolah di Gunung Kidul ambruk dan rusak berat akibat gempa yang terjadi Sabtu (27/5) lalu. Sebagian sekolah terpaksa meniadakan kegiatan belajar dan mengajar karena bangunan sekolah tak memadai dan banyak *siswa masih trauma* (cetak miring dari peneliti)

Sebagian besar sekolah yang rusak ini adalah SD, berlokasi di Kecamatan Patuk. Kepala Sekretariat Posko Penanggulangan Gempa dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Gunung Kidul Budhi Harjo mengatakan, pemerintah daerah masih mengoordinasikan renovasi bangunan sekolah yang rusak itu. Sementara waktu akan disiapkan tenda-tenda sementara untuk kegiatan belajar mengajar (KBM). (dalam *68 Sekolah di Gunung Kidul Rusak, Siswa Trauma, Kompas* / 30 Mei 2006)

Dikatakan unik, karena tubuh berita sebenarnya menceritakan tentang kondisi gedung SD di Gunung Kidul yang rusak terlanda gempa, sesuai dengan judul yang diberikan yakni *68 Sekolah di Gunung Kidul Rusak, Siswa Trauma*, tetapi penceritaan tentang apa dan bagaimana siswa yang mengalami trauma akibat gempa alpa untuk diceritakan *Kompas*.

c. Berdasarkan Data Pendukung

Yang dimaksud data pendukung adalah apakah berita tentang gempa Yogya-Jateng yang ditampilkan oleh jurnalis memuat pula data yang memperkuat pendeskripsian fakta dari sebuah peristiwa, bisa berupa paparan cerita, ilustrasi grafis berupa foto ataupun gambar, peta, tabel dan grafik. Data pendukung tersebut akan memperkuat fakta yang disajikan oleh jurnalis untuk memperkuat pendeskripsian berita. Dari berita yang diteliti, terdapat 83,33% berita menyertakan data pendukung dan 16,67% berita yang tidak menyertakan data pendukung.

Kompas relatif tertib dalam memberikan data pendukung untuk mendeskripsikan peristiwa gempa Yogya-Jateng. Pada edisi pertama setelah gempa, yakni pada terbitan Minggu, 28 Mei 2006, *Kompas* bahkan memberikan data pendukung berupa ilustrasi grafis wilayah Yogyakarta dan sekitarnya secara tiga dimensi, seperti Klaten, Magelang dan Purworejo, untuk kemudian mendeskripsikan jumlah korban yang tewas di masing-masing wilayah kabupaten dan kota. Di halaman bersambung, *Kompas* juga menampilkan peta wilayah kotamadia Yogyakarta untuk mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di wilayah ini.

Namun, pemberitaan *Kompas* berkaitan dengan data pendukung ini bukan berarti tanpa kekurangan. Pada pemberitaan mengenai sejumlah sekolah yang rusak di daerah Gunung Kidul (dalam *68 Sekolah di Gunung Kidul Rusak, Siswa Trauma*, Kompas/30 Mei 2006), *Kompas* tidak menceritakan apa dan bagaimana siswa yang mengalami trauma karena gempa. Padahal realitas ini bahkan dijadikan sebagai anak kalimat dari judul berita.

Kemudian ketika bercerita tentang kelumpuhan ekonomi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya (dalam *Ekonomi Yogya Lumpuh Total-Bandara Adisutjipto Ditutup sampai Minggu Siang*, Kompas / 28 Mei 2006), *Kompas* menyampaikan beberapa indikator kelumpuhan ekonomi, seperti tutupnya bandara, terhentinya aktivitas pasar tradisional dan mall, padamnya listrik, dan macetnya infrastruktur telekomunikasi, serta rusaknya stasiun kereta api. Penceritaan yang cukup detil atau disertai data pendukung yang memadai hanya mengenai tertutupnya bandara, padamnya listrik, dan terhentinya aktivitas pasar tradisional dan mall. Sedangkan rusaknya infrastruktur telekomunikasi hanya ditunjukkan dengan tidak beroperasinya 40 BTS Telkomsel. Kemudian rusaknya stasiun kereta justru diberikan data pendukung yang tidak cocok, yakni berupa rute kereta api yang harus berjalan lambat ketika melalui daerah Srowot di Kabupaten Klaten. Tidak satupun disebutkan stasiun kereta yang mana yang mengalami kerusakan.

d. Berdasarkan Pencantuman Waktu

Ada tidaknya pencantuman waktu dalam penulisan berita terhitung sebagai syarat akurat tidaknya berita tersebut. Yang dimaksud dengan pencantuman waktu ini adalah apakah jurnalis *Kompas* menginformasikan waktu terjadinya peristiwa yang diliput. Juga bisa berupa pencantuman waktu pada saat dilakukan wawancara dengan narasumber berita. Dari berita-berita yang diteliti, terdapat 75% penanda waktu dan 25% penanda waktu yang tidak ditemukan, yang mengidentifikasi waktu terjadi peristiwa atau waktu dilakukannya wawancara.

Pencermatan terhadap ada tidaknya pencantuman waktu peristiwa atau wawancara dilakukan dengan mengecek apakah pencantuman waktu dilakukan pada setiap realitas yang diceritakan oleh *Kompas* dalam sebuah berita. Sebuah berita yang diteliti, ternyata dapat mendeskripsikan dua buah atau lebih realitas yang berbeda walaupun terdapat kedekatan antar peristiwa tersebut. Misalnya pada pemberitaan *Kompas* pada terbitan hari pertama pasca gempa (Minggu, 28 Mei 2006). Walaupun menurunkan judul berita utama *Gempa Yogya Tewaskan 3.098 orang*, yang diceritakan tentu saja tidak hanya melulu soal korban gempa yang tewas, namun juga menceritakan upaya pemerintah daerah maupun pusat, untuk segera melakukan tindakan (tanggap darurat) terhadap bencana gempa. Kemudian menceritakan juga bagaimana suasana pasca gempa di beberapa daerah, seperti Klaten dan Kebumen, juga upaya beberapa rumah sakit di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya yang kewalahan dalam menangani korban gempa.

Untuk lebih menyederhanakan data tersebut, maka bila ditinjau dari per item berita, dari enam berita yang diteliti terdapat satu berita yang tidak jelas pencantuman waktunya, yakni ketika memberitakan sejumlah sekolah rusak akibat gempa yang terjadi di Gunung Kidul (*68 Sekolah Rusak di Gunung Kidul, Siswa Trauma*, *Kompas* / 30 Juni 2006). Di berita lainnya *Kompas* detil dalam mencantumkan waktu, seperti contoh berikut.

Selain itu, praktis *sepanjang hari kemarin* seluruh pusat pertokoan, seperti kawasan Malioboro serta kawasan sekitarnya, tutup total. Bahkan, warung-warung makan juga tutup. Beberapa minimarket yang sempat buka pagi hari diserbu sejumlah warga yang panik dengan memborong barang-barang kebutuhan pokok.

Bandara Adisutjipto ditutup akibat robohnya terminal domestik. Kejadian itu mengakibatkan dua penumpang AdamAir tujuan Jakarta tewas tertimpa bagian atas bangunan. General Manager PT Angkasa Pura I Adisutjipto Aryadi Subagyo mengemukakan, akibat penutupan bandara, diperkirakan 3.400 penumpang yang menggunakan 31 penerbangan tidak bisa diberangkatkan.

Sementara jalur kereta api Yogyakarta-Solo *kemarin pukul 12.00* sudah bisa dilalui meski untuk melewati rel yang rusak di lintas Brambanan-Srowot (Klaten) kecepatan kereta harus dikurangi hingga lima kilometer per jam. (dalam Ekonomi Yogya Lumpuh Total, *Kompas* / 28 Mei 2006)

Pencantuman waktu yang dilakukan Kompas memiliki dua bentuk. Pertama dilakukan langsung dengan menggunakan hari dan tanggal, namun bentuk lainnya adalah dengan menggunakan penunjuk waktu seperti contoh di atas, menggunakan kata atau frasa yang menunjuk pada waktu.

e. Berdasarkan Faktualitas

Faktualitas tidaknya sebuah berita ditentukan apakah terdapat pencampuran opini pada penceritaan fakta-fakta yang membangun sebuah berita. Ini tampak pada kalimat yang digunakan. Semakin banyak pencampuran fakta dengan opini, maka pemberitaan semakin tidak obyektif. Sebaliknya apabila tidak mencampurkan fakta dengan opini, maka pemberitaan semakin obyektif. Dari 188 kalimat yang diteliti, 100% tidak ada unsur yang mengindikasikan pencampuran fakta dengan opini dalam kalimat yang disusun oleh Kompas untuk mendeskripsikan peristiwa gempa Yogya-Jateng.

Dalam memberitakan peristiwa gempa Yogya Jateng, jurnalis Kompas ternyata berhasil menyingkirkan emosi pribadi dalam melakukan peliputan dan penulisan berita. Hasilnya enam berita yang diteliti menunjukkan bersih dari pencampuran fakta dengan opini. Paling maksimal Kompas hanya memainkan gaya bahasa atau majas dalam melukiskan peristiwa. Ini dimaksudkan untuk memperkuat penyampaian pesan.

f. Berdasarkan Atribusi Narasumber

Atribusi narasumber dilihat dari sejauhmana jurnalis *Kompas* mampu mencantumkan atribut dari narasumber, berupa nama, pekerjaan, dan jabatan dalam mendeskripsikan peristiwa gempa Yogya-Jateng sehingga validitas informasi dapat terjaga ketika hendak dilakukan konfirmasi kepada narasumber tersebut.

Dari enam berita yang ditampilkan, *Kompas* menggunakan 29 narasumber. Kesemua narasumber ditampilkan lengkap, mulai dari nama dan pekerjaan/jabatan. Atribut yang lengkap ini memudahkan pihak lain (seperti pembaca misalnya) untuk melakukan verifikasi data sehingga validitas pemberitaan dapat terjaga dengan baik. Adapun contoh pemberitaan dengan menggunakan atribut narasumber :

Bangunan batu yang menjadi pintu gerbang masuk ke kompleks percandian itu juga runtuh sehingga tak bisa digunakan lagi. Selain itu, beberapa bagian

perkantoran *Taman Wisata Candi Prambanan* di kompleks percandian itu, seperti diakui *direktur utamanya, Wagiman Sudiyarso*, mengalami kerusakan, terutama bagian atap.

Direktur Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Budaya dan Pariwisata Suroso yang ditemui di Kompleks Candi Prambanan mengaku prihatin dengan kerusakan di Candi Brahma itu. "Anda melihat sendiri kondisinya, Candi Brahma rusak berat. Butuh waktu lama untuk menata dan memperbaiki kembali candi itu," jelasnya.

Gunung Kidul, Kompas - Minimal 68 sekolah di Gunung Kidul ambruk dan rusak berat akibat gempa yang terjadi Sabtu (27/5) lalu. Sebagian sekolah terpaksa meniadakan kegiatan belajar dan mengajar karena bangunan sekolah tak memadai dan banyak siswa masih trauma. (dalam *Candi Brahma Prambanan Rusak Berat akibat Gempa*, Kompas / 28 Mei 2006)

g. Berdasar Kompetensi Narasumber

Kompetensi narasumber artinya siapa yang memperoleh fakta dari peristiwa yang diliput untuk direkonstruksi menjadi berita, apakah berasal dari wartawan sendiri, pelaku langsung, ataupun pelaku tidak langsung. *Kompas* lebih banyak menggunakan kombinasi wartawan, pelaku langsung, dan pelaku tidak langsung dalam mengumpulkan fakta pada saat peliputan berita (83,33%). Dari enam berita yang diteliti, hanya satu berita yang menggunakan kombinasi wartawan dan pelaku tidak langsung (16,67%). Seperti temuan data berdasar jenis kalimat yang digunakan, di mana ada sekitar 41% kalimat laporan beratribut. Artinya bahwa *Kompas* benar-benar melakukan verifikasi data dalam peliputan berita. Ini dalam rangka menghindari bias berita, yang mengakibatkan pemberitaan menjadi tidak obyektif.

Adapun contoh berita yang menggunakan kombinasi peliputan wartawan, pelaku langsung, dan pelaku tidak langsung, adalah sebagai berikut.

Gunung Kidul, Kompas - Minimal 68 sekolah di Gunung Kidul ambruk dan rusak berat akibat gempa yang terjadi Sabtu (27/5) lalu. Sebagian sekolah terpaksa meniadakan kegiatan belajar dan mengajar karena bangunan sekolah tak memadai dan banyak siswa masih trauma.

Sebagian besar sekolah yang rusak ini adalah SD, berlokasi di Kecamatan Patuk. *Kepala Sekretariat Posko Penanggulangan Gempa dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Gunung Kidul Budhi Harjo (Pelaku Tdk Langsung)* mengatakan, pemerintah daerah masih mengoordinasikan renovasi bangunan sekolah yang rusak itu. Sementara waktu akan disiapkan tenda-tenda sementara untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).

Dalam pantauan di sejumlah SD yang mengalami kerusakan, KBM memang belum ada, meski Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Gunung Kidul memutuskan sekolah tidak diliburkan. Di SD Patuk I, misalnya, hanya sekitar 10 siswa yang datang dari total 167 siswa di sekolah itu (Wartawan).

Mereka akhirnya kembali ke rumah masing-masing sekitar pukul 08.00 karena sebagian besar siswa tak masuk.

Di SD Nglegi II Patuk KBM diganti dengan acara kerja bakti membersihkan bekas-bekas reruntuhan atap bangunan sekolah yang ambruk Sabtu lalu. Baru sekitar pukul 10.30 siswa-siswa yang hanya 60 persen yang hadir dipulangkan.

Subarno, Kepala SD Nglegi II (Pelaku Langsung), mengutarakan, KBM belum akan efektif hingga beberapa hari mendatang mengingat kondisi bangunan yang rusak parah. Ia menambahkan, jika bantuan tenda darurat sudah datang, pihaknya akan segera melaksanakan KBM.

Adapun *Nur Saryanto, Kepala SD I Patuk (Pelaku Langsung)*, menjelaskan, KBM sudah harus dilangsungkan Selasa ini karena para siswa sudah harus menyambut ujian daerah, awal Juni. Namun, bagi siswa yang menjadi korban luka akibat gempa, pihaknya memberi kesempatan untuk diadakan ujian susulan, bahkan dispensasi apabila kondisi lukanya parah.

Di Yogyakarta *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY Sugito MSi (Pelaku Tdk Langsung)* mengimbau sekolah yang bangunannya rusak agar menitipkan kegiatan belajar mengajarnya di sekolah terdekat dulu. Namun, jika memang tidak ada sekolah terdekat yang juga layak untuk digunakan, semua bangunan yang dinilai masih layak bisa digunakan.

“Saya tahu bencana ini sangat berat dampaknya bagi sekolah, guru, siswa, dan masyarakat. Namun, kegiatan belajar mengajar bagi siswa bagaimanapun mesti jalan,” tuturnya. (ITA/pri) (dalam *68 Sekolah di Gunung Kidul Rusak, Siswa Trauma*, Kompas / 30 Mei 2006)

3. Pemberitaan di Kedaulatan Rakyat

a. Berdasarkan Jenis Kalimat

Dari 427 kalimat yang diteliti, menghasilkan data sebagai berikut. (1) Kalimat Laporan Beratribut sebanyak 44,26%; (2). Kalimat Laporan Tidak Beratribut 52,93%, dan; (3). Kalimat Inferensi 2,81%. Berbeda dengan *Kompas*, peliputan berita gempa Yogya-Jateng di *Kedaulatan Rakyat* ternyata sempat diwarnai dengan kalimat inferensi walaupun dengan frekuensi yang kecil, yakni 2,81%. Data menunjukkan bahwa penggunaan kalimat laporan beratribut juga mendominasi,

sebesar 44,26%. Artinya bahwa seperti *Kompas*, *Kedulatan Rakyat* juga rajin mencari konfirmasi pada narasumber untuk memperkuat argumen penulisan berita. Bedanya dengan *Kompas*, *Kedaulatan Rakyat* tidak menuliskan sepatah kalimat pun yang masuk dalam kategori Kalimat Lainnya.

Adapun contoh pemberitaan dengan jenis kalimat laporan adalah sebagai berikut.

Sejak gempa Sabtu (27/5) pukul 05.53 berkekuatan 5,9 SR, sudah terjadi gempa susulan hingga 608 kali. Namun dari jumlah itu, hanya 7-8 kali saja yang dapat dirasakan, dengan intensitas yang terus menurun.

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Yogyakarta, Drs. Jaya Muryadi MSI mengimbau pada seluruh masyarakat yang ada di Yogyakarta, Bantul, Klaten, dan sekitarnya untuk tidak mempercayai adanya isu tsunami yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas bisa menghubungi Badan Meteorologi dan Geofisika Yogyakarta atau melalui nomor telepon (0274) 749 8599. "Memang sampai saat ini gempa susulan masih berlangsung walau dengan intensitas (kekuatannya) sudah mulai enurun. Jadi kemungkinan terjadinya gempa yang lebih besar sangat kecil. Meski begitu bagi masyarakat yang rumahnya dalam kondisi rusak berat alangkah baiknya jika tidak ditempati terlebih dahulu," kata Jaya, Minggu (28/5).

Informasi terakhir di Kantor Badan Meteorologi dan Geofisika Yogyakarta di Dusun Jitengan Balecatur Gamping, sejak terjadinya gempa utama sampai pukul 18.00 WIB sudah terjadi 608 gempa susulan. Sedangkan gempa yang dirasakan sejak Minggu dinihari atau pukul 00.00 sebanyak 4 kali. (dalam *Masyarakat Yogya Masih Panik*, Senin, 29 Mei 2006)

b. Berdasarkan Kesesuaian Judul dengan Isi Berita

Adapun data obyektivitas berdasarkan atas Kesesuaian Judul dengan Isi Berita yang merupakan salah satu unsur Akurasi pada *Kedaulatan Rakyat*, dari 436 kalimat yang digunakan, menghasilkan data sebagai berikut 31,65% sesuai, dan 68,35% tidak sesuai. Dari ini dapat dicermati, ternyata *Kedaulatan Rakyat* sering kali menuliskan berita yang tidak berkorelasi dengan judul yang dibuatnya. Artinya judul yang dibuat oleh *Kedaulatan Rakyat* terlalu sempit untuk menampung peristiwa yang diceritakan pada tubuh (*body*) berita. Dan 68,35 % merupakan angka yang besar, artinya lebih dari 50 % isi berita di delapan buah berita *Kedaulatan Rakyat* yang diteliti tidak mencerminkan judul berita yang dicantumkan.

Ambil contoh pemberitaan *Kedaulatan Rakyat* yang mendeskripsikan masyarakat korban gempa yang terpaksa makan singkong dan tidur di kandang karena karena minimnya bantuan (dalam *Makan Singkong, Tidur di Kandang*, Selasa-30 Mei 2006). Yang diceritakan ternyata hanya kepingan kecil realitas yang terjadi di desa Seloharjo Kecamatan Pundong-Bantul. Sedangkan bagian lain menceritakan tentang penderitaan korban gempa, jumlah korban yang tewas, dan rencana bantuan pemerintah untuk rekonstruksi tempat tinggal.

Yogya (KR) – Bantuan korban gempa di wilayah DIY dan sekitarnya terus mengalir dari berbagai pihak. Namun belum semua bantuan tersebut terdistribusikan secara merata. Sebagian masih menumpuk di sejumlah lokasi. Bahkan di lokasi terpencil hingga Senin (29/5) belum tersentuh bantuan sama sekali. Kebanyakan yang sudah mendapat penanganan dan memperoleh bantuan baru wilayah yang berada di pinggir-pinggir jalan.

Di wilayah Sambirejo Bobok Tempel, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Bantul, pasca gempa, warga tidak pernah menerima bantuan dari mana pun. Akibat gempa, mereka mengungsi di wilayah perbukitan yang dirasa aman. Rumah mereka umumnya rata dengan tanah. “Bagaimana nasib kami ini, rumah tak ada, yang dimakan juga tidak ada, “ keluh Udiwiyono (70).

.....

Rp. 1 Juta per KK. Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan, Pemerintah akan memberikan dana sekitar Rp. 1 juta per kepala keluarga (KK) bagi para korban gempa bumi di DIY dan Jateng mulai minggu ini. Dalam jumpa pers yang berlangsung di Istana Wapres Jalan Merdeka Selatan Senin sore, Wapres Jusuf Kalla menyatakan pemberian dana kepada para korban gempa itu sebagai bantuan untuk pembelian makanan.

Rinciannya, setiap orang akan memperoleh Rp. 3.000,- per hari untuk keperluan lauk pauk. Selain itu per kepala keluarga juga akan memperoleh Rp. 100.000 per bulan untuk keperluan pembelian berbagai peralatan rumah tangga seperti kompor, piring, dan sebagainya. (dalam *Makan Singkong, Tidur di Kandang*, Selasa-30 Mei 2006).

Contoh lain dari ketidaksesuaian antara judul dengan isi berita adalah pada saat menceritakan hancurnya desa wisata Kasongan akibat gempa (dalam *Desa Wisata Kasongan Hancur*, Minggu-28 Mei 2006). Dari 23 paragraf yang dideskripsikan, hanya sekitar enam paragraf pertama yang menceritakan tentang lumpuhnya desa wisata Kasongan akibat gempa. Paragraf berikutnya lebih menceritakan pembatalan wisuda sebuah universitas swasta di gedung JEC,

pembatalan workshop di sebuah hotel, suasana pada saat gempa, dan beberapa rumah sakit yang kewalahan karena menerima korban gempa yang terluka. Ini jelas tidak terakomodasi oleh judul yang hanya berbicara tentang hancurnya desa wisata Kasongan.

c. Berdasarkan Data Pendukung

Adapun hasil analisis isi untuk data pendukung pada pemberitaan gempa Yogya-Jateng di *Kedaulatan Rakyat* adalah sebagai berikut. Dari delapan item berita yang diteliti, 50% menggunakan data pendukung dan 50% lain tidak menggunakan. Konsekuensi logis dari adanya ketidaksesuaian antara judul dengan isi berita adalah tidak detilnya *Kedaulatan Rakyat* dalam mendeskripsikan detail peristiwa. Ini berimbas pada ketidaklengkapan dalam memberikan data pendukung.

Seperti ketika memberitakan sekelompok warga tidur di pemakaman dalam *Warga Karangjaten Tidur di Pemakaman*, Selasa / 31 Mei 2006), *Kedaulatan Rakyat* tidak detil mendeskripsikan pemberitaannya. Misalnya menjelaskan kondisi para korban gempa, jumlah warga yang tidur di pemakaman, bagaimana kondisi perempuan dan balita yang terpaksa tidur di pemakaman, juga mendeskripsikan melalui ilustrasi foto mengenai kondisi pemakaman. Penceritaan hanya berkisar pada adanya sekelompok warga yang menjadi korban gempa dan terpaksa tidur di pemakaman. Pada bagian lain *Kedaulatan Rakyat* malah menceritakan instruksi Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto, yang memberikan pengarahan agar warga yang belum mendapatkan bantuan sampai beberapa hari setelah gempa, segera melapor pada aparat pemerintah dan masyarakat terkait.

Kemudian ketika memberitakan sekelompok masyarakat di kabupaten Bantul yang lapar dan berebut makanan dari pihak pemberi bantuan (dalam *Lapar, Warga Berebut Makanan, Tak Ada Obat-Terpaksa Gunakan Bekicot*, Rabu / 01 Juni 2006). *Kedaulatan Rakyat* memang berupaya untuk mendeskripsikan kondisi beberapa masyarakat di sejumlah pedusunan di Bantul yang karena minim bantuan, terpaksa saling berebut makanan. Namun, ketika menceritakan bahwa kondisi ini terjadi karena tidak meratanya bantuan terhadap korban gempa, *Kedaulatan Rakyat* tidak sedikit pun menceritakan daerah mana yang mengalami kelebihan pasokan bantuan. Juga ketika bercerita penggunaan bekicot untuk menggantikan obat-obatan antibiotik, *Kedaulatan Rakyat* hanya menceritakan adanya sekelompok masyarakat korban gempa yang membutuhkan obat antibiotik, tetapi tidak disebutkan alasan munculnya kebutuhan obat-obatan tersebut. Ini pun hanya diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh pelaku tidak langsung dari

peristiwa. Jadi *Kedaulatan Rakyat* belum mengeceknya sendiri, apakah realitas ini memang benar-benar ada. Unikny, ini justru menjadi sub judul berita. Sebagai berita utama, *Kedaulatan Rakyat* juga tidak memberikan deskripsi foto sebagai bantuan data pendukung. Foto yang dimunculkan adalah tentang sejumlah anggota masyarakat yang sedang melintas di daerah bencana gempa. Pembaca tidak mendapatkan kejelasan rinci atas penceritaan *Kedaulatan Rakyat*. Ini terjadi karena *Kedaulatan Rakyat* tidak menampilkan secara detil data pendukung untuk melengkapi deskripsi cerita.

Dalam berita mengenai kepanikan yang menghinggap berbagai unsur masyarakat (dalam *Masyarakat Yogya Panik dan Shock*, Minggu / 28 Mei 2006), juga ada sebuah realitas yang sebenarnya tidak jelas data pendukungnya. Yakni kala bercerita tentang anak-anak yang trauma karena gempa (paragraf 3 dan 4). Tidak disebutkan dengan jelas kapan dan di mana persisnya tempat peristiwa tersebut. Tidak ada informasi pula yang menyebutkan apakah informasi tersebut diperoleh dari pelaku langsung atau pelaku tidak langsung. Ini jelas membuat keakuratan berita menjadi lemah.

d. Berdasarkan Pencantuman Waktu

Ada tidaknya pencantuman waktu dalam penulisan berita terhitung sebagai syarat akurat tidaknya berita tersebut. Yang dimaksud dengan pencantuman waktu ini adalah apakah jurnalis *Kedaulatan Rakyat* menginformasikan waktu terjadinya peristiwa yang diliput. Juga bisa berupa pencantuman waktu pada saat dilakukan wawancara dengan narasumber berita. Dari 29 item yang harusnya terdapat penanda waktu, 68,97% terdapat penanda waktu dan 31,03% yang tidak tercantum penanda waktunya.

Seperti ketika meneliti *Kompas*, pencermatan terhadap ada tidaknya pencantuman waktu peristiwa atau wawancara dilakukan dengan mengecek apakah pencantuman waktu dilakukan pada setiap realitas yang diceritakan oleh *Kedaulatan Rakyat* dalam sebuah berita. Sebuah berita yang diteliti, ternyata dapat mendeskripsikan dua buah atau lebih realitas yang berbeda walaupun terdapat kedekatan antar peristiwa tersebut. Misalnya ketika menceritakan tentang desa wisata Kasongan yang hancur karena gempa (dalam *Desa Wisata Kasongan Hancur*, Minggu / 28 Mei 2006), yang diceritakan tidak hanya lumpuhnya roda perekonomian dari desa wisata Kasongan, namun juga menceritakan tentang batalnya upacara wisuda sebuah perguruan tinggi swasta dan sebuah workshop Dinas Pariwisata di sebuah hotel, dan suasana kekacauan pasca gempa di beberapa daerah di wilayah Yogyakarta.

Untuk memudahkan pemahaman, data tersebut akan disederhanakan dengan menilik per item berita. Dari delapan buah berita yang diteliti, terdapat satu berita (12,50%) yang tidak mencantumkan waktu terjadinya peristiwa, yakni pada saat mendeskripsikan minimnya bantuan gempa yang mengakibatkan korban gempa saling berebut bantuan (*dalam Lapar, Warga Berebut Bantuan – Tak Ada Obat, terpaksa Gunakan Bekicot*, Kamis / 01 Juni 2006). Seperti juga *Kompas*, *Kedaulatan Rakyat* juga menggunakan dua versi pencantuman waktu. Pertama, sering ditemui adalah bentuk hari dan tanggal, dan yang kedua adalah bentuk frasa yang menunjuk pada waktu tertentu.

e. Berdasarkan Faktualitas

Faktualitas tidaknya sebuah berita gempa Yogya-Jateng di *Kedaulatan Rakyat*, ditentukan apakah terdapat pencampuran opini pada penceritaan fakta-fakta yang membangun sebuah berita. Ini tampak pada kalimat yang digunakan. Semakin banyak pencampuran fakta dengan opini, maka pemberitaan semakin tidak obyektif. Sebaliknya apabila tidak mencampurkan fakta dengan opini, maka pemberitaan semakin obyektif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa bias berita yang dilakukan oleh *Kedaulatan Rakyat* pada delapan berita yang diteliti adalah sekitar 2,81%. Sedangkan yang bersih dari pencampuran fakta dengan opini sebanyak 97,19%. Ini berbeda dengan *Kompas* yang bersih dari pencampuran fakta dengan opini pada saat memberitakan gempa Yogya-Jateng. Yang unik dari *Kedaulatan Rakyat*, pada dua berita terakhir, *Kedaulatan Rakyat* juga bersih dari peliputan dan penulisan berita yang bias. Dan jika dilihat dari berita pertama ke berita keenam, trend penulisan bias antara fakta dengan opini menunjukkan penurunan.

f. Berdasarkan Atribusi Narasumber

Sama seperti *Kompas*, atribusi narasumber dilihat dari sejauhmana jurnalis *Kedaulatan Rakyat* mampu mencantumkan atribut dari narasumber, berupa nama, pekerjaan, dan jabatan dalam mendeskripsikan peristiwa gempa Yogya-Jateng. Sehingga validitas informasi dapat terjaga ketika hendak dilakukan konfirmasi kepada narasumber tersebut. Dari 42 narasumber yang digunakan, sebesar 90,48% memiliki atribut yang jelas, mulai dari nama, wilayah, posisi atau jabatan di masyarakat. Sebaliknya ada sekitar 9,52% atribut narasumber yang tidak jelas. Pada saat menceritakan kepanikan masyarakat Yogya (*dalam Masyarakat Yogya Panik dan Shock*, Minggu / 28 Mei 2006), *Kedaulatan Rakyat* memang sempat tidak memunculkan atribut yang jelas pada dua narasumbernya,

yakni pada seorang ibu rumah tangga (Ema) yang turut membantu memasak di tenda darurat (paragraf 2). *Kedaulatan Rakyat* hanya menyebutkan nama saja. Namun tidak disebutkan berasal dari wilayah mana atau bekerja di tenda darurat mana. Kemudian juga pada beberapa paragraf berikutnya, yakni paragraf 8, juga tidak dijelaskan narasumber berasal dari mana. Hanya penyebutan nama saja yang dilakukan (Sambudi). Tidak jelas apakah anggota masyarakat ini berasal dari wilayah yang sama dengan yang diceritakan pada paragraf sebelumnya. Tidak jelas karena dua paragraf ini bercerita tentang dua realitas di tempat yang berbeda.

Di tepi-tepi jalan kampung banyak berdiri tenda darurat, untuk tempat pengungsian penduduk. Bahkan banyak masyarakat yang kesulitan membeli kebutuhan rumah tangga. “Cari indomie saja sulitnya setengah mati,” kata Rudy salah seorang mahasiswa UIN yang kos di Demangan. Selain banyak ibu rumah tangga yang masak dalam tenda darurat. “Kami belum berani masak dalam rumah. Takut ada gempa lagi,” kata Ema. (?)

.....

Di Alun-Alun Utara, masih ada ratusan, masih ada ratusan kepala keluarga (KK) yang mengungsi. Mereka masih trauma dan takut pulang ke rumah. Para warga yang mengungsi antara lain berasal dari Kelurahan Prawirodirdjan RW 16 RT 53 dan 54. Selain itu juga ada warga RT 69 RW 19 Kelurahan Brontokusuman.

Di Masjid Agung Bantul juga jadi tempat pengungsian warga Bantul. “Saya memilih ke masjid ini, karena rumah saya di Bantul sudah roboh,” kata Sambudi (?) sedih. (dalam *Masyarakat Yogya Panik dan Shock*, Minggu / 28 Mei 2006)

Terdapat realitas media yang unik di *Kedaulatan Rakyat*. Pada berita yang mendeskripsikan minimnya bantuan bagi masyarakat korban gempa di kecamatan Pundong-Bantul (dalam *Makan Singkong, Tidur di Kandang*, Selasa / 30 Mei 2006), ketika sampai pada paragraf enam, tidak jelas masyarakat dusun mana yang hendak diceritakan oleh *Kedaulatan Rakyat*. Hanya dijelaskan ada dusun terpencil yang belum tersentuh bantuan. Penjelasan dari anggota masyarakat akan adanya realitas ini juga tidak mendapatkan atribut yang memadai sehingga sulit jika hendak dilakukan konfirmasi.

g. Berdasarkan Kompetensi Narasumber

Seperti halnya *Kompas*, yang dimaksud dengan kompetensi narasumber adalah siapa yang memperoleh fakta-fakta dari peristiwa yang diliput untuk direkonstruksi menjadi berita dalam peliputan peristiwa gempa Yogya-Jateng di *Kedaulatan Rakyat*, apakah berasal dari wartawan sendiri, pelaku langsung,

ataupun pelaku tidak langsung. Dari delapan item berita yang diteliti, berita yang diperoleh berdasar pengamatan wartawan, pelaku langsung dan pelaku tidak langsung sebesar 50%, wartawan dan pelaku langsung 37,5%, dan wartawan dengan pelaku tidak langsung 12,5%.

4. Analisis Data

Seperti yang telah dikemukakan di depan, obyektivitas secara sederhana dapatlah diartikan menjadi beberapa definisi. Pertama adalah ketidakberpihakan. Biasanya muncul secara jelas pada pemberitaan dari peristiwa yang bernuansa konflik antara dua atau beberapa pihak. Apalagi kepentingan atau bahkan ideologi media terlibat dalam konflik tersebut. Ketidakberpihakan menuntut jurnalis untuk mampu mengakomodasi suara atau pendapat dari semua pihak yang terlibat dalam pertikaian. Baik yang setuju maupun yang tidak setuju, baik yang pro maupun kontra. Sedangkan definisi kedua, obyektivitas dapat diartikan bahwa tidak mencampurkan fakta dengan opini. Artinya jurnalis diwajibkan untuk tidak melibatkan pendapat pribadi, bahkan juga emosi, dalam peliputan dan penulisan berita. Selain peristiwa yang bernuansa konflik, peristiwa yang bernuansa sensasi merupakan peristiwa yang mampu "menggoda" jurnalis untuk melakukan ketidakobyektifan dalam pemberitaan.

Penelitian mengenai pemberitaan gempa Yogya-Jateng lebih memfokuskan penelitian pada sejauhmana obyektivitas mampu diberikan oleh jurnalis ketika meliput peristiwa yang bernuansa sensasi di surat kabar harian *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat*. Pemilihan kedua media cetak tersebut bukanlah tanpa alasan. Seperti yang telah disebutkan pada bagian awal, kedua surat kabar tersebut terhitung besar di wilayahnya masing-masing. *Kompas*, sebagai perwakilan surat kabar nasional, memiliki sekitar 1,7 juta pembaca yang terserak di seluruh Indonesia. Sedangkan *Kedaulatan Rakyat*, sebagai perwakilan surat kabar daerah atau lokal untuk Yogyakarta dan sekitarnya, memiliki tiras 160 ribu per hari. *Kompas* sejak tahun 2004 mulai memiliki edisi khusus untuk wilayah Yogyakarta. Sedangkan *Kedaulatan Rakyat* yang berdiri 27 September 1945 ini tentu saja memiliki kedekatan historis dengan Yogyakarta. Karena itu keduanya menarik untuk diuji.

Untuk menguji derajat obyektivitas dilakukan dengan memberikan skala pada tiap-tiap kategorisasi pada setiap unit analisis.

Tabel 1
Skala Obyektivitas Berdasarkan Kategorisasi Unit Analisis

Unit Analisis	Kategorisasi	Nilai	Derajat Obyektivitas	Skala
Jenis Kalimat	Kalimat Laporan	1	Tinggi	1,00 - 1,66
	Kalimat Inferensi	2	Sedang	1,67 - 2,33
	Kalimat Lainnya	3	Rendah	2,33 - 3,00
Kesesuaian Judul-Isi	Sesuai	1	Tinggi	1,00 - 1,33
	Tidak Sesuai	2	Sedang	1,34 - 1,67
			Rendah	1,68 - 2,00
Data Pendukung	Ada	1	Tinggi	1,00 - 1,33
	Tidak Ada	2	Sedang	1,34 - 1,67
			Rendah	1,68 - 2,00
Pencantuman Waktu	Ada	1	Tinggi	1,00 - 1,33
	Tidak Ada	2	Sedang	1,34 - 1,67
			Rendah	1,68 - 2,00
Faktualitas	Tidak Campur	1	Tinggi	1,00 - 1,33
	Campur	2	Sedang	1,34 - 1,67
			Rendah	1,68 - 2,00
Atribut Nara Sumber	Jelas	1	Tinggi	1,00 - 1,33
	Tidak Jelas	2	Sedang	1,34 - 1,67
			Rendah	1,68 - 2,00

Dari hasil penelitian yang dilakukan, khusus mengenai uji derajat obyektivitas, terdapat data sebagai berikut.

Tabel 2
Perbandingan Derajat Obyektivitas Kompas dan Kedaulatan Rakyat

Unit Analisis	Skh Kompas		Skh Kedaulatan Rakyat	
	Skala	Derajat Obyektivitas	Skala	Derajat Obyektivitas
Jenis Kalimat	1.03	Tinggi	1.02	Tinggi
Kesesuaian Judul-Isi	1.43	Sedang	1.68	Rendah
Data Pendukung	1.17	Tinggi	1.5	Sedang
Pencantuman Waktu	1.17	Tinggi	1.13	Tinggi
Faktualitas	1.00	Tinggi	1.03	Tinggi
Atribut Nara Sumber	1.00	Tinggi	1.10	Tinggi

Tabel 2 menunjukkan bahwa *Kompas* masih memiliki rata-rata derajat obyektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan *Kedaulatan Rakyat*. Apabila penghitungan lebih didetilkan lagi, misalnya dengan memberikan bobot tinggi sama dengan 1, bobot sedang sama dengan 2, dan bobot rendah sama dengan 3, maka diperoleh hasil bahwa *Kompas* memiliki derajat obyektivitas sebesar 1,17, sedangkan *Kedaulatan Rakyat* memiliki derajat obyektivitas 1,50. Artinya *Kompas* memiliki derajat obyektivitas tinggi sedangkan *Kedaulatan Rakyat* memiliki derajat obyektivitas sedang.

Obyektivitas memiliki arti penting dalam proses produksi berita. Tidaklah mengherankan bila Masyarakat Jurnalis Profesional (*Society of Professional Journalists*) menempatkan obyektivitas (dan akurasi) dalam salah satu bagian dari kode etiknya (dalam Black, Steele, dan Barney, 1995; hal. 7). Berbicara tentang obyektivitas, dengan tegas Masyarakat Jurnalis Profesional menyatakan: *Good faith with the public is the foundation of all worthy journalism (1). Truth is our ultimate goal. (2) Objectivity in reporting the news is another goal that serves as the mark of an experienced professional. It is a standart of performance toward which strive. We honor those who achieve it; dan yang ke (3). There is no excuse for inaccuracies or lack of thoroughness. Bahkan jika dilengkapi dengan (4) Newspaper headlines should be fully warranted by the contents of the articles they accompany. Photographs and telecasts should give an accurate picture of an event and not highlight an incident out of context.* Kesemuanya menjadi jelas bahwa jurnalis bukan saja dianjurkan, tetapi wajib untuk tidak emosional atau beropini dalam melaporkan sebuah peristiwa menjadi berita.

Perlunya jurnalis bersikap obyektif karena masyarakat pada dasarnya membutuhkan informasi tentang lingkungan sekitar, untuk kemudian mengambil sikap berbasis pada informasi tersebut. Dalam konteks peristiwa gempa yang melanda Yogya-Jateng, lembaga-lembaga seperti pemerintah dan LSM, membutuhkan informasi yang memadai tentang daerah-daerah terpencil yang tertimpa bencana. Informasi ini diperlukan untuk memfasilitasi bantuan yang datang dari luar Yogyakarta sehingga bantuan tersebut dapat sampai dengan tepat di daerah yang membutuhkan. Tumpuan sebagai pemberi informasi yang memadai ini diharapkan datang dari lembaga media massa seperti surat kabar. Dengan memberikan informasi yang memadai diharapkan kesemrawutan pemberian bantuan bencana dapat diminimalisir. Namun, bila surat kabar tergelitik untuk lebih menekankan nuansa sensasi dalam peristiwa ini, bukan mustahil berita yang dihasilkan akan menggeser perhatian masyarakat, akan perihalnya penting yang sebenarnya ingin disampaikan.

Dalam perspektif makro fungsi komunikasi massa seperti yang dikemukakan Laswell, disebutkan bahwa salah satu fungsi komunikasi massa adalah *linkage* (penghubung atau penyambung), artinya bahwa media massa dapat menggabungkan saluran interpersonal yang memiliki unsur-unsur berbeda dalam suatu masyarakat yang tidak bisa terhubung secara langsung (dalam Dominick, 2005; hal 38 dan juga dalam Becker dan Churchill, 1992; hal 484). Artinya media massa seperti surat kabar misalnya, diyakini mampu berbuat banyak untuk bertindak sebagai penghubung antara dua pihak yang terpisah. Dalam konteks peristiwa gempa bumi Yogya-Jateng, berarti dengan informasi yang memadai mampu menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat ataupun sebaliknya antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan adanya informasi dari surat kabar yang memadai tentang minimnya bantuan bagi masyarakat di salah satu dusun atau desa yang ada di sebuah kecamatan di kabupaten Bantul, akan dengan cepat mendapatkan respon yang baik dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga donor yang berdatangan dari berbagai penjuru. Namun sebaliknya, kesulitan pun dengan mudah datang kala informasi tentang daerah yang mengalami minim bantuan tidak memadai. Pemerintah atau lembaga donor akan sulit mengidentifikasi sehingga sulit pula untuk memberikan bantuan.

Masih dalam perspektif makro fungsi komunikasi massa, selain memiliki fungsi sebagai penyambung ataupun penghubung, fungsi lain dari komunikasi massa adalah fungsi *surveillance* (pengawasan), merujuk pada peran media massa sebagai pengawal atau pengawas bagi masyarakat. Artinya media massa berfungsi memberitahu bahkan mengingatkan masyarakat tentang kemungkinan munculnya bahaya yang datang dari lingkungan sekitarnya (dalam Dominick, 2005; hal. 33 dan juga dalam Becker dan Churchill, 1992, hal 484). Tentu saja dalam konteks peristiwa gempa bumi seperti yang terjadi di Yogya-Jateng, media massa perlu arif dan bijak dalam menyampaikan pesan-pesan. Sekali lagi ini berkaitan dengan obyektivitas. Dengan demikian media massa, dalam hal ini surat kabar tidaklah diperkenankan untuk melebih-lebihkan atau membesar-besarkan peristiwa dalam bentuk berita sensasi (melalui format judul berita yang besar-besar dan tidak sesuai dengan isinya). Dalam jurnalisme verifikasi yang ditawarkan Kovach dan Rosenstiel (2003, hal 95), terdapat seperangkat konsep inti yang menjadi landasan bagi berlakunya uji verifikasi. Dua yang pertama adalah jangan menambahkan sesuatu yang tidak ada, dan jangan menipu audiens. Artinya jurnalis perlu secara konsisten melakukan verifikasi atas fakta yang terjadi di lapangan guna mendapatkan informasi yang pasti sehingga tidak menipu atau membohongi pembaca sehingga fungsi *surveillance* dapat berjalan dengan baik.

Maraknya berbagai isu yang berkembang di masyarakat pasca gempa, mulai dari isu tsunami dan akan munculnya gempa dengan kekuatan yang lebih besar, perlu mendapatkan perhatian yang bijak dari pengelola surat kabar. Maksudnya, surat kabar jangan terjebak untuk menjadi lembaga yang memerkeruh keadaan dengan dalih melaksanakan fungsi *surveillance*. Ketekunan untuk mencari informasi yang akurat tentu menjadi harapan bagi banyak anggota masyarakat di tengah situasi yang tidak pasti. Mengacu pada prinsip keempat yang ditawarkan Kovach dan Rosenstiel (2003: 96), jurnalis wajib melakukan peliputan sendiri untuk mencari bukti dari fakta yang membangun sebuah peristiwa. Hal ini mencegah kekeliruan pemberitaan yang dapat menyesatkan pengetahuan khalayak. Salah satu tugas penting yang diemban para jurnalis dalam setiap proses produksi berita adalah tugasnya untuk memberdayakan masyarakat (Ishwara, 2005; hal 17). Artinya jurnalis haruslah menyakini bahwa informasi yang disampaikan melalui tulisannya, harus mampu untuk semakin membuat masyarakat berkembang. Jadi bukan justru membuat masyarakat menjadi semakin panik dalam situasi bencana.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapatlah disimpulkan bahwa dalam pemberitaan gempa Yogya-Jateng pada *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* sebagai berikut.

- Antara *Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat* memiliki derajat obyektivitas yang sama tinggi dalam hal jenis kalimat yang digunakan dalam menulis berita, pencantuman waktu peliputan berita, faktualitas pemberitaan, dan atribut narasumber yang digunakan.
- *Kompas* memiliki derajat obyektivitas lebih tinggi dalam hal kesesuaian judul dengan isi berita dan data pendukung dibandingkan dengan *Kedaulatan Rakyat*.
- Secara keseluruhan *Kompas* memiliki derajat obyektivitas lebih tinggi dibandingkan dengan *Kedaulatan Rakyat*.

Bonaventura Satya Bharata adalah Dosen program studi Ilmu Komunikasi FISIP-UAJY

Daftar Pustaka

- Becker, Samuel L. and Churchill L. Roberts, 1992. *Discovering of Mass Communication* (3rd ed), Harper Collins Publisher, New York
- Black, Jay, Bob Steele, and Ralph Barney, 1995, *Doing Ethics in Journalism, A Handbook with Case Studies*, Allyn & Bacon, Massachusetts
- Bungin, Burhan (ed), 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta
- Dominick, Joseph R, 2005, *The Dynamics of Mass Communication – Media in The Digital Age*, McGraw Hill International
- Ishwara, Luwi, 2005, *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Itule, Bruce D. and Douglas A. Anderson, 2000, *News Writing and Reporting for Today's Media*, McGraw Hill International
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Rosda Karya, Bandung
- Kovach, Bill and Tom Roscentiel, 2004, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, ISAI Utan Kayu, Jakarta
- Neuman, W. Lawrence, 1997, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*, Allyn and Bacon, Boston
- Noviriyanti, Andi, 2006, *Objektivitas Berita Lingkungan, Jurnalistik Berkelanjutan*, Yayasan Taman Karya, Riau
- McQuail, Dennis, 1992, *Media Performance, Mass Communication and Public Interest*, Sage Publication, London
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Suvei*, LP3ES, Jakarta
- Siregar, Ashadi, 1999, *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Wimmer, Roger D. and Joseph R. Dominick, 2000, *Mass Media Research, An Introduction*, Wadsworth Publishing Company, Belmont

INTERNET

http://agnews.tamu.edu/saas/2003/saunders_.htm

<http://agnews.tamu.edu/saas/sitton2001.htm>

DOKUMENTASI

Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), 2006, *Direktori Pers Indonesia*, Jakarta